

PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SDN PINANG 7

Septy Nurfadhillah¹; Aprilia Setyorini², Bunga Cempaka³, Cantika Rofiqoh Azhar⁴, Putri Fauziah⁵, Raihan Fadhlurrahman Jamirullah⁶, Salma Ramadhanty⁷, Shanti Kusminarti⁸
Universitas Muhammadiyah Tangerang
nurfadhillahsepty@gmail.com ; apriliasetyorini71@gmail.com

Abstract

The implementation of inclusive education in Indonesia aims to provide educational facilities and services for children with special needs (ABK). The implementation of inclusive education has been implemented in elementary schools throughout Indonesia, especially big cities, but in its implementation found many problems. This study aims to describe the problems in the implementation of inclusive education at SDN Pinang 7. Special (GPK) SDN Pinang 7 Tangerang City. The method used is descriptive qualitative which aims to describe "what is" about a variable, symptom or situation. Data collection techniques in this study in the form of interviews, documentation, and observation. The results showed that there were various problems encountered related to the components of educators, students, school management, curriculum, learning processes, cooperation and lack of infrastructure that supports the implementation of inclusive schools, and the incompatibility of infrastructure facilities owned by schools with the needs of children with special needs. In addition, these problems also arise due to the lack of cooperation from various parties, for example with the government and parents and guardians of students.

Keywords: *Inclusive Education Problems, Children with Special Needs*

Abstrak : Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia bertujuan untuk memberikan fasilitas dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah di terapkan di sekolah dasar seluruh Indonesia khususnya kota-kota besar, tetapi dalam pelaksanaannya menemukan banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi di SDN Pinang 7. Subyek pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah Inklusi dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) SDN Pinang 7 Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai permasalahan yang ditemui terkait dengan komponen tenaga pendidik, peserta didik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, kerjasama dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi, dan ketidak sesuaianya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK. Selain itu, permasalahan tersebut juga muncul dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak misalnya dengan pemerintah dan orang tua wali murid.

Kata Kunci: Permasalahan, Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus

PENDAHULUAN

Pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan manusia atau makhluk hidup yang berakal sebagai pendidik atau peserta didik. Pendidikan adalah bagian penting dalam pembentukan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih baik dari berbagai aspek sisi kehidupan. Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu, bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut, dengan memperoleh ilmu pengetahuan di harapkan individu mampu mengembangkan potensi yang di miliki sehingga dapat bersaing dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003, Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, dan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berkaitan dengan upaya pemenuhan hak pendidikan tanpa deskriminasi muncullah pendidikan inklusi Dikdasmen No.380 tahun 2003 yang menyatakan “Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya. Pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk tatanan pendidikan yang berbasis inklusi.

Secara konseptual akademik inklusi diartikan dengan integrasi yang menyeluruh untuk semua siswa tanpa terkecuali siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas reguler yang disesuaikan dengan umur siswa dan letak sekolah (Bélanger dalam Schmidt dan Venet 2012). Di Indonesia, pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai berikut: Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat komponen yang saling terkait agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Komponen pertama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimaksud adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK).

Tenaga pendidik tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap ketercapainya tujuan suatu pendidikan. Dengan berbagai tugas dan peran dari tenaga pendidik maka diharapkan akan mampu memberikan teladan kepada ABK dan juga mengarahkan sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Komponen kedua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah adanya kurikulum yang fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan ABK karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya bervariasi. Komponen ketiga adalah penerapan proses pembelajaran dengan strategi yang beragam. Proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan sumber belajar harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan ABK. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mampu melakukan pengelolaan kelas dan mengelola pembelajaran serta pemahaman terhadap ABK yang mempunyai ragam perbedaan. Komponen pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan penggunaannya baik peserta didik normal ataupun peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru, kepala sekolah dan guru pembimbing khusus di SDN Pinang 7 Kota Tangerang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih mengalami persoalan seperti: Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan peran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana, serta penanaman yang kurang kepada siswa lain untuk dapat menerima ABK.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, sebagai upaya untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan khususnya psikologi pendidikan dan memberi gambaran kepada pemerintah, masyarakat yang bergerak dan mendalami dunia pendidikan khususnya, tentang kendala-kendala yang dihadapi guru maupun pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat SD. Harapannya kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan sesuai karakteristiknya sehingga ke depan dapat diberikan intervensi yang sesuai.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pinang 7 Kota Tangerang yang beralamat di Jalan. KH Hasyim Ashari, RT.001/RW. 003, Kel. Pinang, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Prov Banten, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di SDN Pinang 7 Kota Tangerang didapatkan suatu masalah yaitu permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian deskriptif ingin juga membuktikan dugaan, tetapi hal ini tidak terlalu lazim terjadi. Secara umum penelitian tipe deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2005). Subjek dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Sekolah Inklusi di SDN Pinang 7 Kota Tangerang; dan 2) Guru Pembimbing Khusus (GPK) SDN Pinang 7 Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi. Pedoman wawancara yaitu untuk Guru Pembimbing Khusus (GPK), dan Kepala Sekolah Inklusi di SDN Pinang 7 Kota Tangerang. Pedoman Observasi dilakukan agar mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti melihat kondisi sarana prasarana dan proses belajar mengajar. Pedoman dokumentasi dimaksudkan untuk melihat arsip lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Pinang 7 Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data didapatkan dari hasil kategorisasi pertanyaan terbuka yang sudah dikoding. Hasil dari analisis dipaparkan dalam paparan hasil berikut ini. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah inklusi berdasarkan persepsi dan di kelompokkan berdasarkan komponen di bawah ini :

1. Tenaga Pendidik (Guru)

Tenaga pendidik memiliki peran yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tenaga kependidikan dalam setting inklusif diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus, dan TU. Tenaga kependidikan yang paling berperan yaitu guru, di mana dalam pendidikan inklusif di tingkat SD ada dua guru yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus. Antar guru harus saling bekerja sama dalam memberikan pendidikan agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Pinang 7 Kota Tangerang, ada beberapa masalah terkait dengan tenaga kependidikan. Permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Kurangnya jumlah guru pembimbing khusus di bandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif;
- b. Kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kurangnya pemahaman guru tentang ABK, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi GPK, dan;
- c. Beban administrasi yang semakin berat bagi GPK, baik dari kegiatan asesmen yang harus dilakukan secara berkala maupun bentuk evaluasi yang beragam sesuai dengan karakteristik ABK.

2. Peserta didik

Permasalahan yang berkaitan dengan siswa meliputi :

- a. ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan;
- b. ABK mengalami Kesulitan mengikuti materi pelajaran, hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler sehingga perlu adanya banyak penyesuaian;
- c. Sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM, dan;

- d. Permasalahan siswa regular terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK.

3. Manajemen sekolah

Manajemen sekolah yang baik akan dapat memberikan pengaruh yang baik kepada sekolah dan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam manajemen sekolah diantaranya :

- a. Perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya;
- b. Pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh;
- c. Proses KBM yang sudah berjalan maksimal, selama ini ABK sudah mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.

4. Kurikulum

Pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Pinang 7 Kota Tangerang menggunakan kurikulum K13 yang di pakai sekolah pada umumnya, hal ini karena guru pembimbing khusus sudah menerapkan pengembangan kurikulum sekaligus pembelajaran khusus diluar jam sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Pinang 7 Kota Tangerang sudah berjalan efektif.

5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di SDN Pinang 7 Kota Tangerang dalam setting inklusif yaitu dengan menggabungkan peserta didik normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas secara bersamaan. Dalam proses pembelajarannya di barengkan akan tetapi setelah pulang sekolah anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar tambahan oleh guru pembimbing khusus (GPK), karena guru kelas menangani peserta didik secara keseluruhan.

6. Sarana prasarana

SDN Se Kota Tangerang yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meliputi SDN Gondrong 4, SDN Kunciran 7, SDN Cipete 4, SDN

Panunggangan 1, SDN Pelawad 1 dan masih banyak lagi, merupakan sekolah inklusif yang di dalamnya terdapat beragam peserta didik dengan masing-masing kebutuhan yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya sekolah harus menyiapkan sarana prasarana dan aksesibilitas yang mendukung untuk tercapainya tujuan sekolah.

Beberapa masalah sarana prasana adalah belum tersedianya ruang sumber bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan karena itu sangat dibutuhkan sekali oleh anak berkebutuhan khusus (ABK).

Beberapa masalah sarana prasana adalah ruang sumber bagi abk memiliki kekurangan akan tetapi tidak masalah yang terpenting memiliki guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus, mungkin ada beberapa sekolah yang belum tersedianya ruang sumber bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan. Alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan sekali untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda.

7. Kerjasama

Komponen kerjasama yang di maksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan dinas (pemerintah) dan orang tua peserta didik. Permasalahan kerjasama dengan dinas terkait yaitu belum ada penugasan guru SLB dari dinas untuk dijadikan GPK ke sekolah penyelenggara inklusif akan tetapi hanya penunjukan guru dari sekolah asal untuk menjadi GPK walaupun dengan lulusan yang belum sesuai.

Permasalahan dengan orang tua adalah rendahnya kepedulian orang tua terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, bahkan orang tua terkadang tidak mau tau terkait dengan program program khusus yang harus dilakukan sebagai upaya pemberian layanan pada anak ABK.

Permasalahan yang muncul dari masing masing komponen bila dikaji lebih lanjut akan saling berhubungan dan memberikan dampak yang berbeda-beda. Pertama terkait permasalahan guru. Kualifikasi guru pembimbing khusus yang bukan dari lulusan pendidikan luar biasa juga berdampak pada kurangnya

kemampuan guru dalam memberikan layanan pada ABK, contohnya kesulitan guru dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran individual dan kegiatan belajar mengajar.

Beban guru semakin berat dalam memberikan layanan kepada ABK, ketika dipengaruhi oleh komponen sarana prasarana yang kurang mendukung seperti belum tersedianya ruang sumber bagi ABK dan belum adanya kurikulum plus sebagai hasil pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kustawan, (2013: 130) tugas guru pembimbing khusus (GPK), Memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibilitas. Komponen berikutnya berkaitan dengan kerjasama pemerintah atau dinas terkait yang belum terjalin dengan baik dan para orang tua yang sangat pasif dalam membentuk kerjasama guna memberikan layanan pada ABK.

Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi dipengaruhi oleh keberhasilan dari berbagai komponen dan semua pihak yang terlibat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) sekolah juga harus bekerjasama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.

Budiyanto (2009:13) mengatakan bahwa guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, harus ada kerjasama dengan komponen lain misalnya adanya manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen sekolah dalam setting inklusif menurut Marthan, (2007: 145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Harapan peneliti, bahwa kedepan peneliti lain bisa berfokus pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan masing masing komponen secara umum. Khususnya dari komponen guru yaitu berkenaan dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi guru.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk meningkatkan keprofesionalan guru walaupun terkadang masih tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Lembaga sekolah. Pemerintah juga harus mampu mengajak dan membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap adanya sekolah inklusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Pinang 7 Kota Tangerang yaitu terkait dengan komponen tenaga pendidik yang terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK), peserta didik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, kerjasama dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi, dan ketidak sesuaiannya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak misalnya dengan pemerintah dan orang tua wali murid.

Komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah guru. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pelayanan bagi siswa ABK, agar mampu dalam melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan efisien serta mengembangkan media pembelajaran dan alat peraga sesuai kebutuhan siswa ABK, mampu mengembangkan kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan siswa ABK dan mampu membentuk kerjasama yang baik dengan orang tua wali murid. Hal ini juga di dukung dengan kemampuan lembaga sekolah dalam menjalin kerjasama dengan dinas terkait/pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana yang mendukung sehingga mampu memberikan layanan terbaik pada siswa ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019, Agustus). Permasalahan Dalam Penyelenggaraan. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, Volume 2.
- Depdiknas DIY. 2011. Monitoring Pendidikan Inklusif, belum optimal. <http://www.pendidikan-diy.go.id>
- Medika Zellatifanny, C., & Mudjiyanto, B. (2018, Desember). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol. 1 No. 2, 83-90.
- Schmidt, S & Venet, M. (2012). Principals Facing Inclusive Schooling or Integration. *Canadian Journal Of Education* 35, 1 :217-238.
- Tarnoto, N. (n.d.). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah. *HUMANITAS*, Vol. 13 No. 1, 50-61.